



Sistem tata letak Kota Majapahit sebagai solusi pembangunan daerah dan mengatasi pemukiman kumuh di masa generasi Z

Michael Aprillino Fernandes, Ismail Lutfi*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: ismail.lutfi.fis@um.ac.id

Paper received: 02-01-2023; revised: 10-01-2023; accepted: 30-01-2023

Abstract

The city layout system has long been known in civilization in the archipelago. One of the city layout systems that exist in the civilization of the archipelago itself is the city layout system of the Majapahit Kingdom. Based on some evidence of relics in Mojokerto (Trowulan) which is thought to be the capital of the Majapahit kingdom (Wilwatikta). It can be seen that the Majapahit kingdom already had a very good city layout system, especially the layout for residential areas. The city layout system used by the Majapahit kingdom was able to arrange the location of residential areas very well to prevent the occurrence of slum settlements. Therefore, through this research, it will be studied in depth about the city planning system used by the Majapahit kingdom in regulating the regional development of cities during the Majapahit era, especially the capital of the Majapahit kingdom (Wilwatikta). With the aim of knowing the layout system of the Majapahit city and making it a solution for regional development and overcoming the problem of slum settlements in the current generation Z.

Keywords: city; Majapahit; development; settlement; layout

Abstrak

Sistem tata letak kota sudah lama dikenal dalam peradaban di Nusantara. Salah satu sistem tata letak kota yang ada dalam peradaban Nusantara itu sendiri adalah sistem tata letak kota Kerajaan Majapahit. Berdasarkan beberapa bukti peninggalan yang ada di Mojokerto (Trowulan) yang diduga sebagai ibukota kerajaan Majapahit (Wilwatikta). Dapat diketahui bahwa kerajaan Majapahit telah mempunyai sistem tata letak kota yang amat sangat baik terkhususnya tata letak untuk daerah pemukiman penduduk. Sistem tata letak kota yang digunakan kerajaan Majapahit tersebut mampu mengatur letak daerah-daerah pemukiman penduduk dengan amat sangat baik untuk mencegah terjadinya pemukiman kumuh. Oleh sebab itulah, melalui penelitian ini akan dikaji secara mendalam mengenai sistem tata letak kota yang digunakan oleh kerajaan Majapahit dalam mengatur pembangunan daerah kota-kota dimasa Majapahit terkhususnya ibukota kerajaan Majapahit (Wilwatikta). Dengan tujuan untuk mengetahui sistem tata letak kota Majapahit tersebut dan menjadikannya sebagai solusi untuk pembanguana daerah dan mengatasi masalah pemukiman kumuh di masa generazi Z sekarang ini.

Kata kunci: kota; Majapahit; pembangunan; pemukiman; tata letak

1. Pendahuluan

Pemukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial yang disebabkan karena banyak hal. Namun penyebab utama pemukiman kumuh bisa terjadi adalah pembangunan yang tidak tepat dan pemanfaatan lahan yang salah. Diman pembangun nayang tidak tepat tersebut dapat membuat maslaah seperti halnya berkurangnya daerah resapan air yang menyebabkan terciptanya genangan air bahkan bencana banjir. Selain itu pemukiman kumuh juga dapat menyebabkan adanya penularan penyakit.

Data (2017-2019) dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan dengan jelas bahwa pemukiman kumuh mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Hal ini juga dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Sehingga sudah seharusnya langkah dan solusi untuk mengatasi pemukiman kumuh yang disebabkan pembangunan yang tidak tepat ini segera dilakukan agar masalah sosial tersebut tidaklah semakin besar.

Seperti halnya di masa kerajaan Majapahit, dimana adanya sistem tata letak kota yang mengatur letak bangunan-bangunan penting, saluran air, pemukiman, dan tempat-tempat penting lainnya. Berdasarkan peninggalan situs dapat dikatakan bahwa sistem tata letak kerajaan Majapahit ini terbukti bisa mengatasi banjir dan mencegah munculnya pemukiman kumuh dimasa itu, khususnya di ibu kota Majapahit yang dikenal dalam Kakawin Desawarnana tepatnya di pupuh ke dua belas dengan nama Wilwatikta (Mulyana, 2011; Pigeud, 1960; Saktiani, 2018) yang diduga sekarang ini berada di Mojokerti (Trowulan).

Oleh sebab itu hal ini sangatlah menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, dikarenakan peneliti berharap sistem tata letak kota Majapahit dapat menjadi sebuah solusi pembangunan dimasa sekarang ini termasuk mencegah terjadinya/munculnya pemukiman-pemukiman kumuh yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak tepat sasaran.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang dibantu dengan metode penelitian lapangan dan metode pustaka. Metode penelitian sejarah terdiri dari lima tahap yaitu pemilihan topic, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (Kuntowijoyo 2013). Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di situs ibukota Majapahit yang ada di Mojokerto (Trowulan). Kemudian penggunaan metode pustaka untuk mendapatkan referensi dari penelitian sebelumnya mengenai sistem tata letak kota kerajaan Majapahit.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sistem Tata Letak Kota Majapahit

Dalam sistem tata letak kota Majapahit dapat ditemukan pembagiannya sebagai berikut: a) dinding Kota Majapahit, b) gapura atau pintu gerbang Kota Majapahit, c) prasarana jalan kota dan jaringan saluran air, d) lapangan umum kota, e) balai pertemuan umum, f) pasar, g) bangunan suci dan tempat sesaji, h) keraton dan istana raja, i) kepatihan dan tempat tinggal pejabat tinggi lainnya, dan j) tempat tinggal rohaniawan (Hermanislamet, 1999).

Semua unsur-unsur tersebut membuat bisa dikatakannya bahwa sistem tata letak kota masa Majapahit merupakan sistem yang efisien dan mutakhir dikarenakan sistem ini telah mengatur tata letak saluran air, jalan, dan juga letak tempat-tempat penting termasuk pemukiman penduduk.

Bukti-bukti peninggalan yang ditemukan di Mojokerto (Trowulan) diantaranya berupa kanal dan pondasi rumah (pemukiman) menunjukkan kepada kita bahwa di masakerajaan Majapahit terdapatnya standart tersendiri untuk tata ruang kota yang bertujuan untuk mencegah terjadinya/terciptanya pemukiman kumuh terkhususnya diwilayah ibu kota kerajaan Majapahit (Wilwatikta). Ibukota Majapahit (Wilwatikta) dapat ditemukan dalam pupuh dua belas Kakawin Desawarnana yang ditulis oleh Pu Prapanca.



Gambar 1. Rekonstruksi Ibukota Kerajaan Majapahit (Wilwatikta) yang Sekarang menjadi Trowulan Mojokerto

Sumber: Peta National Geographic 2012 (Thamrin, 2012)

Bahkan diperkirakan sistem pengairan yang diterapkan Majapahit mampu untuk mengatasi kekeringan terkhususnya dalam bidang pertanian di musim kemarau. Sistem pengairan tersebut juga diperkirakan mampu untuk mencegah banjir di musim penghujan. Ssaah satu bentuk tinggalan mengenia sistemp pengairan Majapahit ialaha situs Kolam Segaran. Menurut Sutikno (2013), Untuk menjaga kelembapan pada musimkemarau dibuat Segaran. Tinggalan yang berupa bekas saluran berpola tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan ketersediaan air pada musim kemarau, disamping untuk drainase (Sutikno 2013).

3.2. Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh dapat tercipta karena adanya penggunaan lahan atau pembangunan daerah yang kurang tepat atau tidaklah sesuai dengan standart yang ada, dimana hal tersebut dapat memicuh hal yang kurang baik (masalah sosial) seperti penularan penyakit atau berkurangnya daerah resapan air yang menyebabkan banjir dan bencana alam lainnya. Dikarenakan daerah resapan air berkurang karena dijadikan/dialihkan untuk keperluan lain yang membuata daerah tersebut tidak dapatlagi berfungsi sebagai daerah resapan air.

Seperti halnya yang terjadi di Pesisir Sungai Ciliwung (Kota Malang). Menurut Ramadhani dan Fernandes (2022), Ciliwung termasuk Kawasan dataran rendah. Pada daerah ini bisa dikatakan menjadi langganan banjir disetiap musim hujan disebabkan oleh kurangnya saluran air atau telalu sempit saluran air sehingga tidak dapat menampung air yang melimpah, banyak bagian lahan yang tadinya dijadikan sebagai daerah resapan air yang berbentuk cekung

beralih fungsi menjadi pemukiman. Sehingga saat hujan turun, air hujan akan menggenang dalam area cekungan tersebut, tidak ada konsistensi kebijakan dari pihak yang berwenang (penyusunan dari pihak Pemda seharusnya menggunakan pembangunan dengan konsep sustainable development. Perencanaan pembangunan masih berpihak pada pelaku ekonomi. Tidak heran jika yang ditonjolkan hanyalah Kawasan industry yang pesat dan juga Kawasan perdagangan. Sudah seharusnya paradigma ini diubah yang mengacu terhadap pelestarian lingkungan), dan konservasi lingkungan sudah jarang dilakukan. Karena kejadian itulah maka Kawasan penampungan air hujan dan daerah resapan semakin lama menjadi semakin sedikit bahkan akan hilang. Hal tersebut menyebabkan potensi genangan air yang melimpah semakin besar sehingga berpeluang menimbulkan banjir.

Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dikatakan bahwa pemukiman kumuh di beberapa wilayah provinsi Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan peningkatan. Peningkatan pemukiman kumuh paling banyak terjadi di tahun 2018-2019 dimana kenaikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta.

Provinsi	2017	2018	2019
ACEH	8,10	9,12	10,18
SUMATERA UTARA	8,25	8,74	10,00
SUMATERA BARAT	9,97	9,36	10,52
RIAU	5,80	3,36	7,50
JAMBI	5,99	5,21	7,80
SUMATERA SELATAN	11,22	12,68	17,87
BENGKULU	14,85	9,13	14,56
LAMPUNG	4,44	4,33	14,31
KEP. BANGKA BELITUNG	3,41	5,13	21,94
KEP. RIAU	3,43	5,70	17,48
DKI JAKARTA	14,55	14,36	42,73
JAWA BARAT	11,86	11,16	19,86
JAWA TENGAH	3,53	3,21	9,02
DI YOGYAKARTA	3,95	2,77	3,79

Gamabr 2. Data Pemukiman Kumuh di Beberapa Daerah Indonesia (2017-2019)

Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi kita, dikarenakan selain berpotensi menyebabkan bencana alam seperti halnya banjir, pemukiman kumuh juga dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial hingga masalah kesehatan (penyakit).

Sehingga hal ini tentu memerlukan solusi dan tindakan nyata yang tepat, agar masalah-masalah itu tidaklah sampai terjadi dan pemukiman kumuh tidaklah bertambah. Salah satunya dengan menerapkan pembangunan yang tepat yang tetap menjaga daerah resapan air.

3.3. Sistem Tata Letak Kota Majapahit sebagai Solusi Pemukiman Kumuh

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini bukan bermaksud untuk membandingkan masa kerajaan Majapahit dengan masa generasi Z sekarang ini. Namun penelitian ini bermaksud untuk memberikan solusi untuk pemukiman kumuh yang disebabkan adanya kesalahan pembangunan pada masa sekarang ini. Dimana adanya beberapa pembangunan yang kurang mempertimbangkan kondisi geografis dan alam yang ada di daerah yang akan dibangun.

Sehingga dalam penelitian ini diajukannya inovasi dimana penggunaan sistem tata letak kota untuk mencegah terjadinya pemukiman kumuh. Hal ini dikarenakan sistem tata letak kota Majapahit memberikan solusi yang tepat untuk pengairan air agar tidak terciptanya genangan air maupun terjadinya bencana banjir dengan sistem pengairannya yang menggunakan kanal. Kanal-kanal tersebut juga selain untuk mengalirkan air (parit) juga mampu untuk menjadi alternative irigasi sawah. Bahkan juga terdapatnya drainase buatan yang sekarang ini dikenal dengan nama situs kolam segaran yang dapat menampung air untuk mencegah kekeringan di musim kemarau.

Sistem letak kota Majapait juga mampu untuk mencegah munculnya pemukiman kumuh, diakrenakan dari hasil bukti situs pemukiman masa Majapahit yang ada di Mojokerto (Trowulan) bisa dikatakan bahwa Majapahit mempunyai standart tersendiri untuk bangunan rumah dan tata letak pemukiman penduduk (kota dan desa). Dimana situs pemukiman Majapahit di Trowulan tersebut, menunjukkan bahwa bangunan rumah yang ada di Trowulan tidak berdesakan satu sama lain.



Gambar 3. Situs Pemukiman Majapahit di Trowulan Mojokerto

Sistem Tata Letak Kota Kerajaan Majapahit merupakan sistem pembangunan yang juga menyesuaikan dengan beberapa aspek di daerah yang akan dilakukan pembangunan. Adapun hal tersebut adalah: 1) iklim, 2) geologi, 3) geomofologi, 4) tata air, dan 5) penggunaan lahan. Kelima faktor ini bisa dikatakan sebagai pertimbangan utama dalam penerapan pembangunan wilayah (kota) pada masa kerajaan Majapahit. Tujuan mempertimbangkan kelima faktor tersebut adalah agar pembangunan yang dilakukan tidaklah memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial maupun alam.

Hal inilah yang membuat kami mengajukan sistem tata letak kota Majapahit sebagai solusi dimana sistem ini dapat menjadi semacam tolak ukur/standart pertimbangan untuk menentukan pembangunan apa yang akan dilakukan disuatu daerah. Namun dalam penerapannya dimana sekarang, tentu diperlukannya penyesuaian dengan kondisi support teknologi yang ada di masa sekarang ini. Dimana teknologi dan ilmu pengetahuan di masa sekarang ini mampu membuat sistem tata letak kota Majapahit menjadi lebih baik dan lebih efisien.

4. Simpulan

Kerajaan Majapahit sudah mengenal dan menerapkan sistem tata letak kota. Sistem tata letak kota yang digunakan oleh kerajaan Majapahit mengatur segala bentuk tempat-tempat yang ada di perkotaan khususnya mengenai penggunaan lahan untuk pemukiman. Sehingga pemukiman maupun fasilitas umum dapat tertata dan berfungsi dengan maksimal. Selain itu dengan penerapan sistem ini, sangatlah memungkinkan untuk mencegah terjadinya/munculnya pemukiman kumuh.

Pemukiman kumuh sendiri merupakan masalah sosial, dikarenakan pemukiman kumuh dapat menimbulkan masalah lain seperti halnya masalah kesehatan dan ketimpangan sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun (2017-2019) di seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya pemukiman kumuh yang muncul di Pesisir Sungai Ciliwung Kota Malang. Pemukiman kumuh itu sendiri dapat muncul karena adanya pertumbuhan kepadatan penduduk disertai dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan di wilayah tertentu yang tidak disesuaikan dengan kondisi wilayah yang akan dibangun tersebut.

Sehingga hal ini membuat kami mengajukan inovasi berupa penerapan sistem tata letak kota pada masa Majapahit di masa generasi Z sekarang ini. Inovasi ini bukannya bertujuan untuk membandingkan masa Majapahit dengan masa sekarang ini. Namun inovasi ini bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi pemukiman kumuh. Dimana sistem tata letak kota Majapahit dapat menjadi contoh maupun pertimbangan ketika akan dilakukannya pembangunan di suatu daerah.

Salah satu bukti peninggalan dari penerapan sistem ini adalah situs sisa-sisa pemukiman yang sekarang ini ada di kota Mojokerto tepatnya di kawasan situs Trowulan. Melalui situs itu kita dapat mengetahui bahwa sistem tata letak kota Majapahit sudah teruji, dengan tidak adanya pemukiman yang berdesakan. Selain itu juga terdapatnya sistem pengaturan air yang amat sangat baik berupa drainase yang dapat mencegah banjir dan bisa turut digunakan sebagai irigasi pertanian serta mencegah kekeringan.

Daftar Rujukan

- Hermanislamet, B. (1999). *Tata ruang kota Majapahit: Analisis keruangan bekas pusat Kerajaan Hindu Jawa abad XIV di Trowulan Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kuntowijoyo, K. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Mulyana, S. (2011). *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*. LKIS.
- Pigeud, T. H. G. (1960). *Java in the Fourteenth Century*. KITLV Press.
- Safitri, S. (2015). Telaah Geomorfologi Kerajaan Majapahit. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1).
- Saktiani, D. (2018). *Kakawin Nagarakertagama*.
- Sutikno, D. R. (2013). Kondisi Geografis Keraton Majapahit dalam "700 tahun Majapahit". Surabaya: CV. Wisnu Murti.
- Thamrin, M. Y. (2012). *Majapahit (Temuan-Temuan Terbaru Mengungkap Kearifan dan Teknologi Tata Air Metropolitan pada Masa Klasik Indonesia)*. National Geographic Indonesia.